



**RENCANA KERJA (RENJA) 2022**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**SIDENRENG RAPPANG**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat-NYA Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 dapat kami rampungkan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng,                      Agustus 2021  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,

**INDAH SAID ROEM, SE., M.A.P**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19640610 199307 2 002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU .....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	39
3.3 Program dan Kegiatan .....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	47
BAB V PENUTUP .....	49
LAMPIRAN .....	50

**DAFTAR TABEL**

Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	12
Tabel T-C 30 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang.....	26
Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	28
Tabel T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	36
Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis, perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018-2023 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2020-2023.

Visi kepala daerah yang terpilih adalah: *“terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai daerah agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan sejahtera”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, badan kesatuan bangsa dan politik dalam merumuskan kebijakan mendasari misi ke 7 yaitu *“Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.”*

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018-2023 yang kemudian akan di jabarkan melalui rencana kerja pada tiap tahunnya. Tahun 2022 diperlukan perencanaan rencana kerja untuk satu tahun kedepan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
- Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stake holder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Sidenreng Rappang didasari oleh:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- g) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas

- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pembangunan rumah Ibadat;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
  - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
  - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah;
  - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - l) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai pancasila;
  - m) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
  - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
  - o) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
  - p) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Konflik Sosial;
  - q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- t) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- u) Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah;
- v) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);
- w) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- x) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas;
- y) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana kerja ini di susun dengan maksud untuk menjabarkan RKPDP Tahun 2022 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RAPBD Tahun 2022,



- b) Menjadi penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 1 tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini terdiri atas:

❖ **Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

❖ **Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

❖ **Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

❖ **Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri atas:

❖ **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

❖ Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

❖ Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
  - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- ❖ Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:
- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
  - 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
  - 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- ❖ Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
- Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH , terdiri atas:

❖ Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

❖ Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

❖ Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
  - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  - b. Pencapaian SDGs,
  - c. Pengentasan kemiskinan,
  - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
  - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  - f. Pengembangan daerah terisolir,
  - g. Dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Misal:
  - a. Jumlah Program dan kegiatan
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dana apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

Pencapaian pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2020 dan 2021 menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2022.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Realisasi kinerja tercapai 100% hampir pada semua kegiatan pada tahun 2021, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan rutin. Kegiatan - kegiatan yang tercapai adalah sbb:

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peraangkat daerah.
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat
- ✓ Administrasi Umum Perangkat
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian kinerja renja pada tahun 2021 dikarenakan realisasi kinerja pada beberapa kegiatan tersebut menyesuaikan kondisi kebutuhan pada tahun berjalan

seperti pada kegiatan: pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, Penyedia dan peraturan dan perundang-undangan serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berpengaruh signifikan dikarenakan target-target yang tidak tercapai merupakan program kegiatan rutin.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan lebih mempertimbangkan besaran kebutuhan dan kemampuan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**TABEL T-C 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini</b>	100 %		100	100	100%	<b>100</b>	100	100%
	1. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah dialog dan koordinasi	48 Bln		0	0	0%	12	12	25%
	2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	60 Laporan		12	12	100%	12	24	40%
	3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Rapat koordinasi FKUB	7 Kali		0	0	0%	0	1	14%
	4. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rapat koordinasi FPK	7 Kali		0	0	0%	0	1	14%



	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	100	%		100	100	100%	<b>100</b>	100	100%
	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi	30	Org		30	30	100%	0	30	100%
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	780	Org		0	0	0%	130	130	17%
	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	65	Org		65	65	100%	0	65	100%
	3. Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	780	Org		0	0	0%	0	130	17%
	4. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	800	Org		0	0	0%	200	200	25%
	5. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	1300	Org		0	0	0%	260	260	20%
	6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	520	Org		0	0	0%	130	130	25%
	7. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	1300	Org		0	0	0%	260	260	20%
	8. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Ormas	Jumlah ormas ber SKT	90	Ormas		0	0	0%	75	75	83%
	<b>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan</b>	100	Org		100	100	100%	<b>100</b>	100	100%
	1. Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan	420	Org		420	420	100%	0	420	100%
	2. Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas	100	Org		100	100	0%	0	100	100%

	3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK	198	Org		198	198	100%	0	198	100%
	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase masyarakat &amp; SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	100	%		100	100	100%	<b>100</b>	100	100%
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	1560	Org		130	130	100%	130	260	17%
	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	55	Dok		11	11	100%	11	22	40%

	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan administrasi perkantoran</b>	100	%		100	100	100%	<b>100</b>	100	100%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	1260	Lbr		220	220	100%	250	470	37%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	60	Bln		12	12	100%	12	24	40%
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	60	Bln		12	12	100%	12	24	40%
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	70	Unit		12	12	100%	13	25	36%
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60	Bln		12	12	100%	12	24	40%
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bln		12	12	100%	12	24	40%
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	334	Buah		61	61	100%	70	131	39%
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180	Eksp		36	24	67%	36	60	33%
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	314	Kali		34	34	100%	70	104	33%
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	675	Kali		29	1	3%	155	156	23%
	11. Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	60	Bln		12	12	100%	12	24	40%

# RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	100 %		100	100	100%	<b>100</b>	100	100%
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	234 Buah		30	30	100%	54	84	36%
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	38 Unit		3	3	100%	9	12	32%
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 Unit		1	1	100%	1	2	40%
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	70 Unit		12	10	83%	13	23	30%
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	60 Unit		5	5	100%	10	15	25%
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	50 Unit		6	6	100%	10	16	32%
	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	4 Unit		0	0	0%	1	1	25%
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	100 %		0	0	0%	<b>100</b>	100	100%
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21 Laporan		5	5	100%	4	9	43%
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	4 Laporan		0	0	0%	1	1	25%



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
  1. Subbag Perencanaan dan Keuangan
  2. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Jabatan Kelompok Fungsional
- d. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas Jabatan Kelompok Fungsional
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan adalah:

### **(1) Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;

- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Merencanakan Program Kerja Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- j. Mengikuti rapat-rapat terikat urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- l. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:
- m. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- n. menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- o. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ideology, wawasan kebangsaan karakter bangsa;
- p. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang politik dalam negeri;
- q. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ketahanan ekonomi, social, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
- r. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik:
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan politik;

- t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- b. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;



- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonperintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- v. menilai kinerja pegawai
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Hubungan Antar Lembaga

perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan perumusan teknis operasional sistem dan implementasi politik,

kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik serta budaya dan pendidikan politik;

- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dalam Skala Kabupaten;
  
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat;
  
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
  
- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintaha di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
  
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Bidang Kesatuan Bangsa

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam skala Kabupaten;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga Kerja, Penanganan Konflik Pemerintahan, Penanganan Konflik Sosial, Pengawasan orang asing dan Lembaga asing skala Kabupaten;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dibidang Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;

- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Ketahanan Idiologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- k. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan dan masyarakat dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat perbatasan, Tenaga Kerja, Penanganan Komplik Pemerintahan dan Sosial, Pengawasan Orang Asing dan lembaga Asing skala Kabupaten;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Indikator kinerja pelayanan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**TABEL T-C 30**  
**CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Kesbangpol				Realisasi Capaian		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
				2019	2020	2021	2022	2019	2020 (per Juni 2020)	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000			15,08%	14,41%	13,62%	12,86%	12,14%		13,62%	12,86%	
2.	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu		√	83,60%	-	-	-	-	-	-	-	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Beberapa isu-isu penting yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

#### **A. Bidang Hubungan Antar Lembaga**

1. Rendahnya pendidikan politik bagi kaum pemilih pemula dan kaum marjinal,
2. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah,
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait undang-undang ormas,
4. Belum optimalnya pendataan ormas mengakibatkan rendahnya pengawasan terhadap ormas.

#### **B. Bidang Kesatuan Bangsa**

1. Sengketa lahan HGU di beberapa wilayah
2. Kelangkaan gas elpiji tabung 3 kg
3. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih tinggi
4. Unjuk rasa/aksi damai yang dapat menjadi potensi konflik
5. Rendahnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat yang mengakibatkan belum maksimalnya kesadaran bela negara masyarakat.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan kesatuan Bangsa dan Politik:

**TABEL III**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Urusan Wajib</b>				5.302.344.357	<b>Urusan Wajib</b>				5.302.344.357	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>2.690.202.357</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>2.690.202.357</b>	
	1. KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	100 %	12.000.000	1. KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	100 %	12.000.000	
	1.1 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	2.000.000	1.1 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	2.000.000	
	1.2 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan	1 dok	3.000.000	1.3 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan	1 dok	3.000.000	



# RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA Perubahan	2 dok	2.000.000	1.4 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA Perubahan	2 dok	2.000.000	
	1.4 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan	2 dok	2.000.000	1.5 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan	2 dok	2.000.000	
	1.5 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Dpa Perubahan yang dihasilkan	1 dok	3.000.000	1.6 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Dpa Perubahan yang dihasilkan	1 dok	3.000.000	
	<b>2 KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 %	2.180.831.357	<b>2 KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 %	2.180.831.357	
	2.1 SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bln	2.176.566.357	2.1 SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bln	2.176.566.357	
	2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah koordinasi dan pelaporan keuangan	4 lap	745.000	2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah koordinasi dan pelaporan keuangan	4 lap	745.000	
	2.3 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 lap	3.520.000	2.3 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 lap	3.520.000	
	<b>3 KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100 %	94.520.000	<b>3 KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100 %	94.520.000	
	3.1 SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan Jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	68 bh	2.000.000	3.1 SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan Jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	68 buah	2.000.000	

# RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.2 SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan		jumlah Bahan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 esk	2.520.000	3.2 SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan		jumlah Bahan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 esk	2.520.000	
	3.3 SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 kali	90.000.000	3.3 SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 kali	90.000.000	
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	155 kali				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	155 kali		
4	<b>KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	100 %	83.583.000	4 KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	83.583.000	
	4.1 SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	8 unit	83.583.000	4.1 SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	8 unit	83.583.000	
			jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	60 buah				jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	60 buah		
5	<b>KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 %	169.480.000	5 KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	169.480.000	
	5.1 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah dokumen Bermaterai	260 lbr	2.200.000	5.1 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah dokumen Bermaterai	260 lbr	2.200.000	
	5.2 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik	12 bln	36.000.000	5.2 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik	12 bln	36.000.000	
	5.3 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	131.280.000	5.3 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	131.280.000	
			Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln				Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln		

# RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	<b>KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah</b>	100 %	149.788.000	6	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100 %	149.788.000
6.1	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin / berkala	12 Unit	97.700.000	6.1	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin / berkala	12 Unit	97.700.000
6.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 Unit	12.400.000	6.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 Unit	12.400.000
6.3	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di pelihara rutin/berkala	15 unit	39.688.000	6.3	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di pelihara rutin/berkala	15 unit	39.688.000
			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di pelihara rutin/berkala	15 unit			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di pelihara rutin/berkala	15 unit			
	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan</b>		<b>Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/ Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</b>	50 %	80.971.000		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan		Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/ Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	50 %	80.971.000
	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		<b>Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa</b>	50 %	80.971.000		KEGIATAN Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa	50 %	80.971.000

## RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	260 org	80.971.000	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	260 orang	80.971.000	
			Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Penyuluhan Bela Negara	200 Org				Jumlah masyarakat yang mendapatkan [penyuluhan Bela Negara	200 Orang		
			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Perubahan Pola Pikir, Cara Kerja dan Cara Hidup	390 Orang				Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Perubahan Pola Pikir, Cara Kerja dan Cara Hidup	390 Orang		
			Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Pembauran Kebangsaan	50 orang				Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Pembauran Kebangsaan	50 orang		
	<b>PROGRAM Peningkatan Peran artai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>		<b>Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	85 %	884.900.000	<b>PROGRAM Peningkatan Peran artai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>		<b>Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	85 %	884.900.000	
	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>		<b>Presentase masyarakat dan partai politik yang mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih pemuda</b>	85 %	884.900.000	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>		<b>Presentase masyarakat dan partai politik yang mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih pemuda</b>	85 %	38.230.000	

# RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan, Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan politik bagi pemilih pemula	110 Orang	846.670.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan, Demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan politik bagi pemilih pemula	110 Orang	846.670.000	
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah dokumen LPJ bantuan Keuangan Parpol	11 dok	38.230.000	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah dokumen LPJ bantuan Keuangan Parpol	11 Dok	38.230.000	
			jumlah laporan pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik	12 Laporan				jumlah laporan pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik			

# RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi</b>		<b>Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diperdayakan</b>	100 %	91.622.000	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi		Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diperdayakan	100 %	91.622.000	
	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>		<b>Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat</b>	100 %	91.622.000	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat	100 %	91.622.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	130 Orang	41.902.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	130 orang	41.902.000	
	Pelaksanaan Monitirong Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Ormas	85 Ormas	49.720.000	Pelaksanaan Monitirong Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Ormas	85 ormas	49.720.000	
	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya</b>		<b>Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	90 %	783.948.000	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya		Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	90 %	783.948.000	

# RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>		<b>Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	90 %	783.948.000	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	90 %	783.948.000	
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah pelajar dan masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang narkotika dan prekursor	550 Orang	783.948.000	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah pelajar dan masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang narkotika dan prekursor	550 orang	783.948.000	
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	260 orang				Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	260 orang		
	<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah</b>	100 %	770.701.000	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	100 %	770.701.000	
	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial</b>	100 %	770.701.000	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	770.701.000	

# RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan penanganan konflik di daerah	390 Orang	88.670.000	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan penanganan konflik di daerah			390 Orang	88.670.000	
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah laporan kewaspadaan dini	12 laporan	55.286.000	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah laporan kewaspadaan dini	12 laporan	55.286.000	
			jumlah laporan pemantauan orang asing	2 laporan				jumlah laporan pemantauan orang asing	2 laporan		
			Jumlah pemantauan orang asing	2 kali				Jumlah pemantauan orang asing	2 kali		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi forum pimpinan daerah kabupaten/kota	12 bulan	626.745.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi forum pimpinan daerah kabupaten/kota	12 bulan	626.745.000	



### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan masyarakat di peroleh melalui kegiatan musrenbang dimulai pada tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Musrenbang ini berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Program dan kegiatan tersebut yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021.

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 yang sejalan dengan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah:

1. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
2. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022: "Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman".

Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesbang dan Politik Kab. Sidrap guna mendukung program prioritas pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini.
2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan pengawaasan dan pemberdayaan ormas.
4. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat dirumuskan tujuan yaitu: "Mewujudkan

Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan di Wilayah Kab. Sidrap”, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Menguatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat,
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Visi kepala daerah yaitu: *“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agri Bisnis”* dan misinya yaitu: *“Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif”*. Hal ini merupakan salahsatu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Untuk memenuhi target visi dan misi kepala daerah serta untuk target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dapat dirumuskan Rencana Kerja sebanyak (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota
  1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah  
Sub Kegiatan :
    - 1) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
    - 2) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
    - 3) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
    - 4) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
    - 5) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah  
Sub Kegiatan :
    - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
    - 3) Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan:
  - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 2) Penyediaan bahan dan peratutan perundang-undangan
  - 3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan :
  - 1) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
5. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan:
  - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan:
  - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - 3) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau baguanan lainnya

- Program Penguatan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
Kegiatan: Peumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaanbidang ideology pancasila dan karakter kebangsaan  
Sub Kegiatan

1. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologin wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

➤ Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Pemantauan Situasi Budaya Politik

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Sub kegiatan:

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

➤ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

➤ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Sub kegiatan:

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

➤ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang di butuhkan pada tahun 2022 untuk Belanja sebesar Rp. 5.302.344.357, dan diperkirakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 5.476.057.416. dimana sumber pendanaanya bersumber dari APBD II Kab. Sidenreng Rappang.

Rumusan rencana program dan kegiatan pada tahun 2022 dan perkiraan maju pada tahun 2023 dapat di uraikan pada tabel berikut:

**TABEL T-C 33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib				5.302.344.357				5.476.057.416
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>2.690.202.357</b>			<b>100 %</b>	<b>2.757.457.416</b>
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah		100 %	12.000.000			100 %	12.000.000
	1.1 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PANGKAJENE SIDENRENG	2 lap	2.000.000			2 lap	2.000.000
	1.2 SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan		1 dok	3.000.000			1 dok	3.000.000

## RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.3	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	2 dok	2.000.000		2 dok	2.000.000
1.4	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan	2 dok	3.000.000		2 dok	3.000.000
1.5	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Dpa Perubahan yang dihasilkan	1 dok	2.000.000		1 dok	2.000.000
2.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 %	2.180.831.357		100 %	2.202.582.000
2.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bln	2.176.566.357		14 bln	2.198.332.000
2.2	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaporan keuangan	4 lap	3.520.000		4 lap	3.500.000
2.3	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 lap	745.000		1 lap	750.000
3.	<b>KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100 %	94.520.000		100 %	94.820.000
3.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	Jumlah dan Jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	68 Buah	2.000.000		68 Bh	2.000.000
3.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 esk	2.520.000		36 Eksp	2.520.000



## RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	3.3 SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		70 kali			70 Kali	
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		155 kali	90.000.000		155 Kali	90.300.000
4	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	83.583.000		100 %	75.255.416
	4.1 SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan		10 unit			10 unit	
		jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan		40 Buah	83.583.000		40 buah	75.255.416
5	<b>KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100 %	169.480.000		100 %	172.300.000
	5.1 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen Bermaterai		220 lbr	2.200.000		220 lbr	2.000.000
	5.2 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik		12 bln	36.000.000		12 bln	38.000.000
	5.3 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bln			12 bln	
		Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran		12 bln	131.280.000		12 bln	132.300.000
6	<b>KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah</b>		100 %	149.788.000		100 %	200.500.000

## RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.1	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin / berkala		12 Unit	97.700.000			12 unit	98.000.000
6.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		15 Unit	12.400.000			15 unit	12.500.000
6.3	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitas i sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di pelihara rutin/ berkala		12 unit	39.688.000			12 unit	40.000.000
		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di pelihara rutin/ berkala		15 unit			15 unit		
6.4	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang /berat		1 unit	-			1 unit	50.000.000
		jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 unit			1 unit		
<b>Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		<b>Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/ Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</b>		<b>50 %</b>	<b>80.971.000</b>			<b>50 %</b>	<b>116.000.000</b>
<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		<b>Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa</b>		50 %	80.971.000			50 %	116.000.000

## RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.1	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Kerja di bidang wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa dan pembauran		4 Lap	0			4 Laporan	10.000.000
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan		260 Orang	80.971.000			260 orang	81.000.000
		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Penyuluhan Bela Negara		200 org				200 org	
		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Perubahan Pola Pikir, Cara Kerja dan Cara Hidup		390 org				390 org	
		Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Pembauran Kebangsaan		50 Orang				50 orang	
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Koordinasi di Bidang Pembauran Kebangsaan		2 kali	0			2 kali	15.000.000
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah monitoring di bidang wawasan kebangsaan, bela negara		15 kali	0			15 kali	10.000.000

**RANWAL RENCANA KERJA 2022**  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	<b>Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>		<b>85 %</b>	<b>884.900.000</b>			<b>90 %</b>	<b>885.300.000</b>
	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Presentase masyarakat dan partai politik yang mendptakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemuda</b>		85 %	884.900.000			90 %	885.300.000
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan politik bagi pemilih pemula		110 Orang	846.670.000			110 org	847.000.000
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah dokumen LPJ bantuan keuangan parpol		11 dok	38.230.000			11 dok	38.300.000

## RANWAL RENCANA KERJA 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik		12 lap				12 Lap	
	<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Organisasi dan Masyarakat Yang Diberdayakan</b>		100 %	91.622.000			87 %	92.000.000
	<b>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat</b>		100 %	91.622.000			87 %	92.000.000
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan		130 org	41.902.000			130 orang	42.000.000
	Pelaksanaan Monitirong Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah Ormas		85 ormas	49.720.000			85 ormas	50.000.000
	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya</b>	<b>Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>		90 %	783.948.000			90 %	794.000.000

**RANWAL RENCANA KERJA 2022**  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		90 %	783.948.000			90 %	794.000.000
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelajar dan masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang narkoba dan prekursor		260 org	783.948.000			260 org	784.000.000
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama		550 org				550 org	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah monitoring bidang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat beragama		5 kali	0			5 kali	10.000.000
	<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>770.701.000</b>			<b>100 %</b>	<b>831.300.000</b>
	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial		100 %	770.701.000			100 %	831.300.000

**RANWAL RENCANA KERJA 2022**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kerja di bidang FKDD, pemantauan orang asing dan penanganan konflik di daerah		3 laporan	0		3 laporan	10.000.000
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatka penyuluhan penanganan konflik di daerah		390 Org	88.670.000		390 Org	89.000.000
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kewaspadaan dini		12 Laporan	55.286.000		12 Laporan	55.300.000
jumlah laporan pemantauan orang asing			2 Laporan	2 Laporan				
Jumlah pemantauan orang asing			2 kali	2 kali				

**RANWAL RENCANA KERJA 2022**  
*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pemantauan pengendalian penyakit masyarakat		4 kali	0			4 kali	50.000.000
		Jumlah pengawasan orang asing		12 Lap				12 lapporan	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi forum pimpinan daerah kabupaten/ kota		12 Bul an	626.745.000			12 Bulan	627.000.000



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**Program dan kegiatan**

Pelaksanaan program/kegiatan dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa faktor permasalahan yang dihadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran/target.

Faktor pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai tahun 2022 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian visi dan misi kepala daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang, karena secara tidak langsung berkaitan dengan pembangunan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Sehingga diharapkan adanya persamaan persepsi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tim anggaran daerah dalam mengukur besaran anggaran yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Uraian Pelaksanaan Program Kegiatan, adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestran SKPD</li> </ol>
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ol>
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum</li> </ol>
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ol>
2	Program Penguatan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
3	Program Peningkatan Peran	Perumusan Kebijakan Teknis	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

	Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Pemantauan Situasi Budaya Politik	dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.  2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

			Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<p>1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.</p>

**BAB V**  
**P E N U T U P**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2018 - 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunan dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditentukan, termasuk pemenuhan target tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: “Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah Kab. Sidenreng Rappang”.

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 yaitu: meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini, menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat, mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas serta meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022.

Semoga penyusunan renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian target kinerja dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2021  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,

**INDAH SAID ROEM, SE, M.A.P**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19640610 199307 2 002